

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KPKNL PADANG

TAHUN 2021



Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Padang Timur – Kota Padang, Sumatera Barat
Telp.(0751)28299 Fax.(0751)21306



LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
TAHUN ANGGARAN 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi	2
Isu Strategis Organisasi	6
Sistematika Laporan	8
Bab II Perencanaan Kinerja	9
Rencana Strategis	9
Perjanjian Kinerja	10
Pengukuran Kinerja	12
Perkembangan Implementasi Pengelolaan Kinerja	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
Capaian Kinerja Organisasi	13
Kinerja Lainnya	25
Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko	26
Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Untuk Tahun 2022	27
Realisasi Anggaran	28
Bab IV Penutup	30
Lampiran	32

PENGANTAR

Budaya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas *good governance* tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2021, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi.

Hal tersebut mendasari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2021 ini. LAKIN ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas KPKNL Padang kepada masyarakat atas segala pelayanan yang disediakan, yang menitikberatkan pada pencapaian kinerja yang tertuang ke dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Padang Tahun 2021. Penilaian kinerja KPKNL Padang telah menggunakan sistem *balance scorecard* (BSC) yang dinilai berdasarkan pencapaian IKU yang mewakili keberhasilan KPKNL Padang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Padang dengan Menteri Keuangan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LAKIN KPKNL Padang Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat akan visi, misi, program, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPKNL Padang. Dengan *full disclosure* pada sasaran strategis dan IKU KPKNL Padang, dan dengan mengingat hakikat KPKNL Padang selaku instansi penyedia layanan publik, diharapkan tercipta suatu kontrol sosial atas kinerja KPKNL Padang yang pada

akhirnya bermuara kepada peningkatan kinerja dan performa serta pelayanan yang dapat kami berikan kepada masyarakat luas. Dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang menjunjung tinggi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta dengan didorong oleh semangat *One Team, One Spirit, One goal*, KPKNL Padang selalu melakukan *continuous improvement* demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya ke dalam penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Padang,

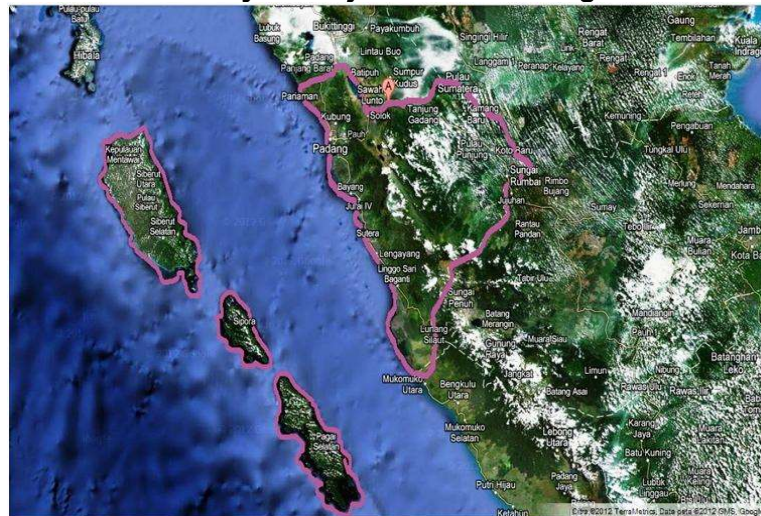
Edy Suyanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

KPKNL Padang merupakan kantor daerah yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang berada dibawah bimbingan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. KPKNL Padang berkedudukan di kota Padang, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 yang wilayah kerjanya mencakup 11 kota/kabupaten disekitarnya. Kota/Kabupaten tersebut yaitu: Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

GAMBAR 1
Wilayah Kerja KPKNL Padang



LAKIN 2021 ini disusun untuk menyediakan informasi kepada masyarakat terkait kinerja KPKNL Padang sekaligus memenuhi asas akuntabilitas dalam suatu penyelenggaraan negara yang baik. LAKIN berfungsi sebagai tolak ukur kinerja secara kuantitatif serta menyediakan peran

kontrol sosial akan kinerja KPKNL Padang. Penyusunan LAKIN 2021 ini didasarkan pada Rencana Strategis 2020-2024 serta kontrak kinerja KPKNL Padang yang telah mencakup penilaian kinerja serta capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat turut mengawasi dan memonitor kinerja KPKNL Padang.

Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Padang memiliki fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sesuai dengan visi dan misi KPKNL Padang, telah dirumuskan sasaran strategis yang kemudian dirinci

secara mendetail ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan IKU tertuang secara kuantitatif di dalam kontrak kinerja yang memudahkan proses penilaian. Penilaian terhadap IKU dilakukan secara sistematis melalui *e-performance* yang pada akhirnya menunjukkan capaian kinerja KPKNL Padang.

Adapun sasaran strategis KPKNL Padang Tahun 2021 adalah:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Tertuang dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan capaian 115,22 %;
2. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP) dengan capaian 109,46%;
3. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara dengan Capaian 103,94%.

Hal ini diperoleh dari kerjasama antar pejabat dan pegawai KPKNL Padang dan *stakeholder* terkait.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Tertuang dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan capaian 101,91%;
2. Persentase Realisasi Pokok Lelang dengan capaian 105,19%.

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Tertuang dalam IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL. Pada tahun 2021, KPKNL Padang ditargetkan memperoleh indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL minimal sebesar 4,45 (skala 5) dan pada akhir tahun anggaran KPKNL Padang memperoleh indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,85. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang berkesinambungan dengan satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPKNL Padang, baik secara *face to face* atau penggunaan sarana “Layanan APT Online”. *Continuous improvement* yang terus menerus dilakukan oleh seluruh pegawai KPKNL Padang diharapkan dapat selalu memenuhi harapan pengguna layanan KPKNL Padang.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tertuang dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase Bidang tanah BMN yang disertipikatkan dengan hasil capaian adalah 101,73%;

2. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Potofolio Aset) dengan capaian akhir adalah 104,41%;
3. Persentase Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian dengan capaian 7,21% dari target yang ditetapkan sebesar 22%. Persentase capaian tersebut sebesar 120%.

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tertuang dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN dengan hasil capaian adalah 100%;
2. Persentase produktivitas lelang, dengan hasil yang dicapai adalah 47,30% dari target yang diberikan yaitu 35%;
3. Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dengan hasil capaian sebesar 108,70%;
4. Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN dengan capaian 0,00% dari target yang ditetapkan 12,50%. Persentase capaian tersebut sebesar 120%.

6. Edukasi yang Efektif

Sasaran strategis ini diwakili oleh tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi yang pada tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar 92. KPKNL Padang berhasil membukukan capaian 98,50 dari target. Persentase capaian tersebut sebesar 107,07%. Persentase ini berkat usaha KPKNL Padang dalam mengedukasi pengguna jasa terkait *current Issue* dibidang kekayaan negara dan lelang melalui sosialisasi maupun konsultasi di area pelayanan kantor dan melalui media komunikasi lainnya seperti media cetak dan media sosial serta melalui portal/website KPKNL Padang.

7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Sasaran strategis ini memiliki IKU presentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara dengan capaian 89,61% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Persentase capaian tersebut sebesar 105,42%.

8. SDM yang Kompeten

Sasaran strategis ini diidentifikasi oleh IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai baik *hard competency* maupun *soft competency*, dimana pada akhir tahun anggaran tercapai realisasi sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

9. Organisasi yang Fit For Purpose

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM dengan capaian nilai 98,30 dari target nilai yang ditetapkan sebesar 85. Persentase capaian tersebut sebesar 115,65%;
2. Nilai hasil review pengelolaan kinerja dengan capaian sebesar 96,25 dari target yang ditetapkan sebesar 75. Persentase capaian ini sebesar 120%;
3. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dengan capaian sebesar 8,65 dari target yang ditetapkan sebesar 80. Persentase capaian ini sebesar 120%.

10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 90,45% dari target 95,5%. Pada tahun 2021. Realisasi anggaran adalah sebesar 98,88% atau sebesar Rp1.686.813.498 dari total pagu sebesar Rp1.705.843.000

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pencapaian kinerja tahun 2021, KPKNL Padang masih memiliki banyak kekurangan, namun dengan sepenuh hati kami senantiasa berupaya dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari segi kebijakan, standar prosedur operasi, maupun dalam pelaksanaan teknis di lapangan sehingga pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya dapat tercapai lebih optimal.

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

Budaya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas *good governance* tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2021, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

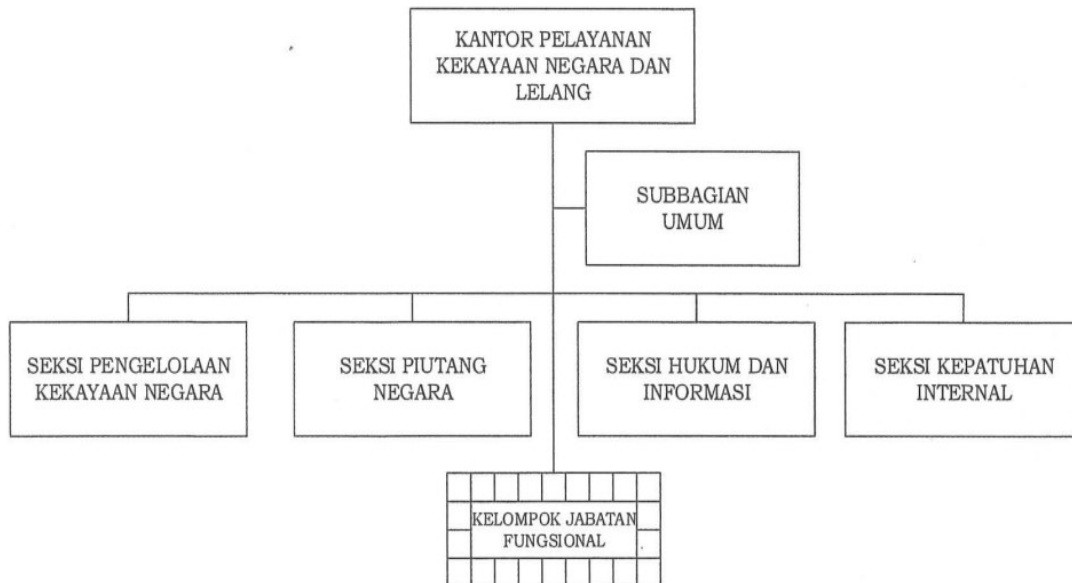
- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi, dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang Negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Padang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit Eselon IV dan 1 unit Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sementara Struktur Organisasi KPKNL Padang dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:

GAMBAR 2
Bagan Organisasi KPKNL Padang



Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh sumber daya manusia yang ada di KPKNL Padang. Berdasarkan Data per-31 Desember 2021 jumlah pegawai KPKNL Padang adalah 31 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

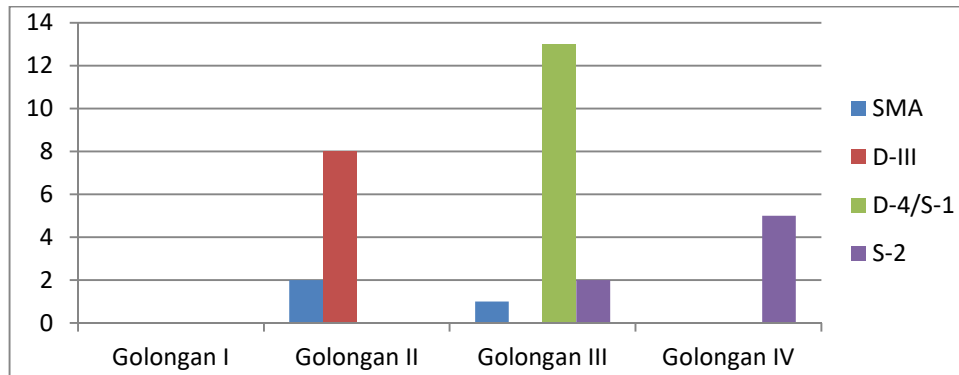
a. Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Secara komposisi, pegawai KPKNL Padang terdiri dari pegawai lulusan Sarjana Strata 1 (S1) dengan jumlah 13 orang, dan pegawai lulusan SMA dengan jumlah 3 orang, dengan 1 orang diantaranya menduduki golongan III. Sementara lulusan DIII berjumlah 8 orang dan S2 berjumlah 7 orang, dengan tabel sebagai berikut:

TABEL 1

PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SMA	0	2	1	0	3
D-III	0	8	0	0	8
D-4 / S-1	0	0	13	0	13
S-2	0	0	2	5	7
TOTAL	0	10	16	5	31

GRAFIK 1



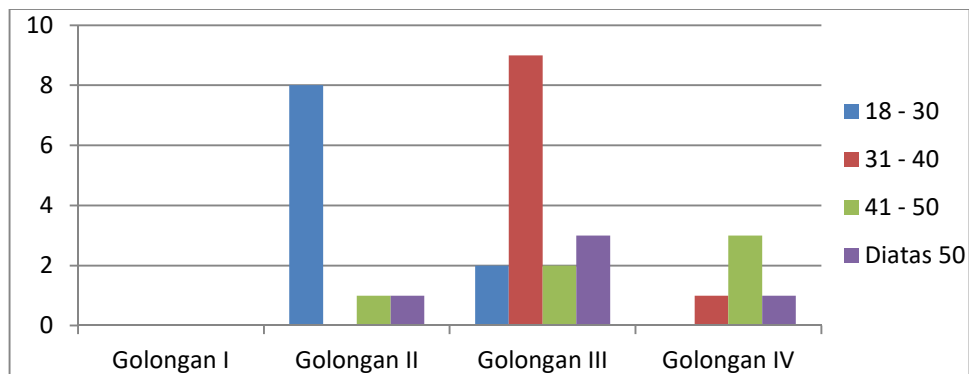
b. Berdasarkan Umur dan Golongan

Komposisi pegawai KPKNL Padang menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, KPKNL Padang akan kehilangan banyak pegawai karena pensiun (usia di atas 50 tahun sejumlah 5 orang). Sedangkan untuk pegawai berusia di bawah 30 tahun berjumlah 10 orang, pegawai usia 31-40 tahun berjumlah 10 orang dan pegawai dengan rentang usia 41-50 tahun berjumlah 6 orang

TABEL 2

UMUR	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	8	2	0	10
31-40	0	0	9	1	10
41-50	0	1	2	3	6
Diatas 50	0	1	3	1	5
TOTAL	0	10	16	5	31

GRAFIK 2



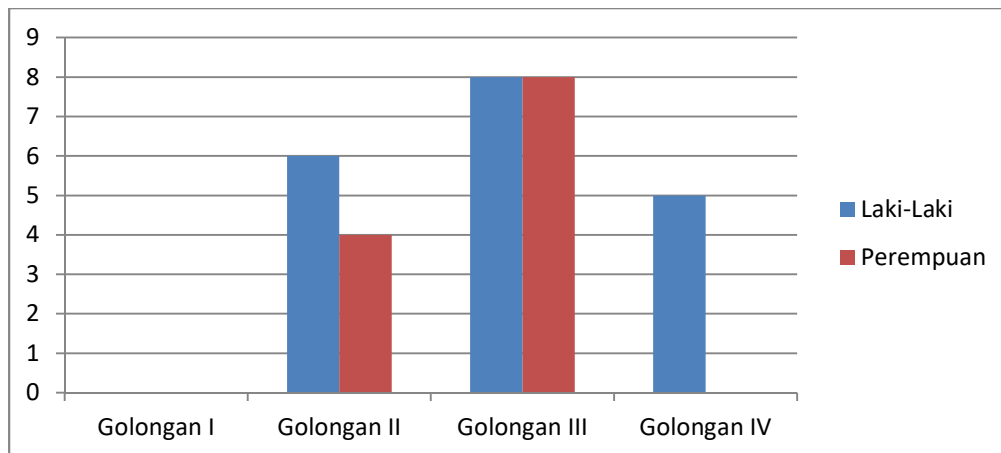
c. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan golongan. Terlihat bahwa pegawai KPKNL Padang mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 19 orang, dan 12 orang berjenis kelamin perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel seperti di bawah:

TABEL 3

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	0	6	8	5	19
Perempuan	0	4	8	0	12
TOTAL	0	10	16	5	31

GRAFIK 3



d. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Hingga saat ini KPKNL Padang memiliki pejabat fungsional pekelang sebanyak 4 orang, pejabat fungsional penilai sebanyak 2 orang dan pejabat fungsional penata laksana barang sebanyak 1 orang. Selain itu, beberapa orang pegawai memiliki kompetensi fungsional, masing-masing dengan keahlian sebagai Juru Sita, Pejabat Lelang, Penilai, dan Pemeriksa.

ISU STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan Negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Padang memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut:

a. Memberikan Pelayanan Lelang

KPKNL Padang sebagai Kantor pelayanan memberikan pelayanan lelang berupa penyediaan sarana transaksi penjualan secara umum. KPKNL Padang memberikan pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi yang berasal dari instansi pemerintah, BUMN/D, swasta maupun masyarakat. Keuntungan melakukan penjualan dengan mekanisme lelang dibandingkan dengan transaksi jual biasa adalah jual beli melalui lelang bersifat lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang sebagai alat bukti otentik.

Permohonan lelang yang banyak diajukan ke KPKNL Padang selama tahun 2021 adalah Lelang Eksekusi Wajib Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) atas barang tidak bergerak dari kreditur/bank, sementara daya beli masyarakat atau swasta masih rendah dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang sulit sebagai dampak adanya pandemi covid-19 dan banyaknya gugatan atas lelang tersebut serta kesulitan untuk penguasaan barang setelah dibeli. Untuk mengatasi hal ini, Seksi Pelayanan lelang kembali melakukan penggalian potensi lelang ke berbagai instansi, masyarakat, BUMN/D dan swasta, melaksanakan lelang produk UMKM melalui program Kedai Lelang UMKM.

b. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Padang dalam pelayanan pengurusan piutang negara adalah sebagai pihak yang melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Pada tahun 2021, dampak dari adanya bencana non alam yakni pandemi COVID-19 membuat debitur kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran maupun pelunasan terhadap piutangnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BIAD seperti melakukan penelitian lapangan secara langsung. KPKNL Padang juga telah berupaya mendorong para debitur untuk memanfaatkan program keringanan hutang (crash program) dengan berbagai potongan pembayaran berdasarkan waktu pelunasan hutang. Di penghujung tahun 2021 KPKNL

Padang bersama dengan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah berhasil melakukan penyitaan aset milik Grup Texmaco seluas 125.360 meter persegi yang berada di daerah Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Penyitaan ini dilakukan karena Grup Texmaco memiliki kewajiban hingga Rp29 triliun dan 80,5 juta dolar Amerika Serikat (AS) kepada negara atas dana BLBI.

c. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

KPKNL Padang memiliki peran strategis untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan negara untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Padang telah melakukan penatausahaan BMN pada satuan kerja dalam program portofolio aset dan SBSK sebagai tindak lanjut penatausahaan BMN yang tertib dan optimal. Di samping itu, seksi pengelolaan kekayaan negara bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mensertipikatkan tanah sejumlah 1.060 bidang yang tersebar dalam 7 kabupaten/kota di wilayah kerja KPKNL Padang.

d. Melakukan Penilaian Kekayaan Negara

KPKNL Padang mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang milik negara lainnya yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga. Penilaian juga dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

e. Memberikan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

KPKNL Padang memperoleh hasil berupa biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak juga diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dengan pihak ketiga, dimana satuan kerja menyetorkan sendiri ke Kas Negara sesuai dengan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan KPKNL Padang mendukung tujuan DJKN sebagai *Distinguished Asset Manager*.

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Padang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif;

Memuat visi, misi, sasaran strategis, dan gambaran umum KPKNL Padang, serta capaian-capaian yang berhasil dibukukan oleh KPKNL Padang selama tahun 2021.

Bab I Pendahuluan;

Pada bab ini dijelaskan mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi serta peran strategis yang dimiliki KPKNL Padang, dan yang terakhir sistematika penyajian LAKIN 2021.

Bab II Perencanaan Kinerja;

Bab ini menyajikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Padang, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan KPKNL Padang untuk mencapai tujuannya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja;

Mengungkapkan pengukuran capaian indikator kinerja utama, evaluasi dan analisis kinerja, kinerja lainnya, dan akuntabilitas keuangan.

Bab VI Penutup

Menyajikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat koordinatif dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam rentang waktu tertentu. Perencanaan strategis KPKNL Padang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategi disusun agar pelaksanaan tugas pokok fungsi KPKNL Padang sebagai instansi pelayanan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang adalah: *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.”*

Visi tersebut mengandung pesan bahwa KPKNL Padang sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma, waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan arah gerak serta batasan lingkup kinerja KPKNL Padang yang tertuang dalam misi yaitu:

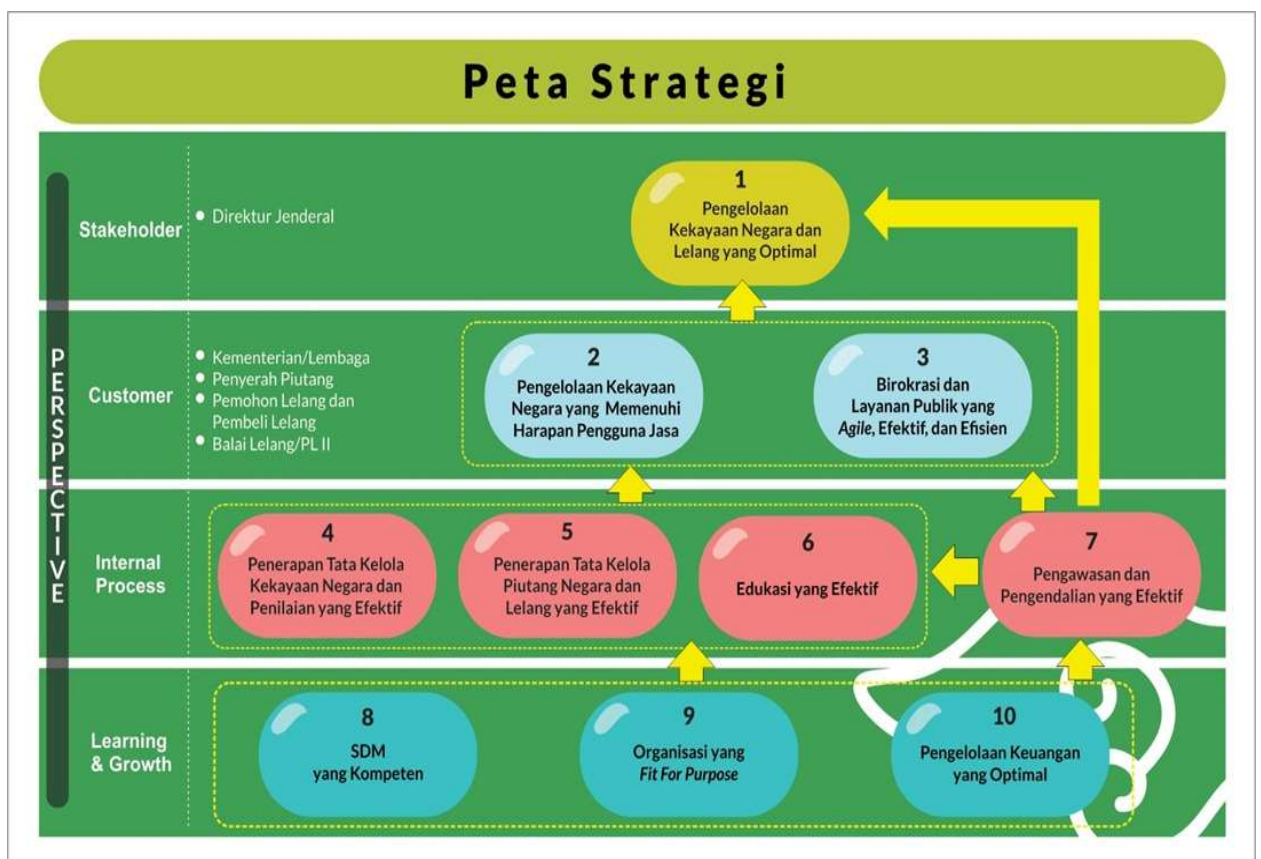
- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah
- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan

- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Padang membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Padang tahun 2021 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2021 terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

GAMBAR 3



TABEL 5
KONTRAK KINERJA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu Layanan kekayaan negara dan Lelang	92
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,45 (skala 5)
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang efektif	6a-N	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	92 (skala 100)
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang <i>fit-for-purposes</i>	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85 WBBM
		9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021

: Rp1.705.843.000

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2021, KPKNL Padang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan Kinerja merupakan serangkaian proses dari penyusunan rencana kerja sampai dengan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan visi dan misi organisasi dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-Three dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

Selain evaluasi capaian kinerja, KPKNL Padang juga melakukan reviu kontrak kinerja dengan tujuan untuk memperbaiki budaya kinerja organisasi, meningkatkan awaranness unit KPKNL Padang dalam rangka tertib administrasi dokumen pengelolaan kinerja organisasi, dan mendapatkan *feedback* untuk perbaikan pengelolaan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021 terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama KPKNL Padang diperoleh hasil dimana seluruh IKU mencapai target yang ditentukan, kecuali IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Berikut rincian capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU KPKNL Padang tahun 2021:

**TABEL 6
CAPAIAN KINERJA**

**Unit Organisasi Eselon III : KPKNL padang
Tahun Anggaran : 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	71,85%	115,22%
		1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	Rp13.374.193.189	Rp14.638.871.743	109,46%
		PKN	PNBP Pengelolaan BMN	Rp10.300.000.000	Rp12.357.792.357	103,9%
		PN	PNBP Piutang Negara	Rp7.193.189	Rp15.542.905	216,08%
		Lelang	PNBP Lelang	Rp3.067.000.000	Rp2.265.536.481	73,87%
		1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	Rp777.933.929	Rp808.567.922	103,94%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu Layanan kekayaan negara dan Lelang	92	92,85	101,91%
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Pokok lelang PL I : Rp52.000.000.000 Pokok Lelang Pegadaian : Rp26.000.000.000	Pokok lelang PL I : Rp26.640.097.586 Pokok Lelang Pegadaian : Rp55.409.749.500	105,19%

3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,45	4,85	108,99%
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	1.042	1.060	101,73%
		4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	68	71	104,41%
		4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	7,21%	120,00%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPKN	68	68	100,00%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%	48,1%	120,00%
		5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100%	108,70%
		5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	0,00%	120,00%
6.	Edukasi yang efektif	6a-N	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	92	98,5	107,07%
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	89,61%	105,42%
8.	SDM yang kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120,00%
9.	Organisasi yang <i>fit-for-purposes</i>	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85	98,3	115,65%
		9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75	96,25	120,00%
		9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	98,65	120,00%

10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	90,45%	94,71%
-----	-----------------------------------	--------	--	-------	--------	---------------

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021	: Rp1.705.843.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2021	: Rp1.686.813.494
Jumlah Efisiensi Anggaran Program Tahun 2021	: Rp19.029.506

Pada tahun 2021, KPKNL Padang mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,24. Dari 20 IKU terdapat 1 IKU yang capaiannya kuning, yaitu IKU Pengelolaan Keuangan yang Optimal. Nilai Kinerja Organisasi tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 103,40. Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-Three tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three tahun 2021 sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Tujuan dari SBSK ini adalah untuk memastikan asset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*highest and best use principle*). Sasaran strategis dari SBSK ini adalah terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas Pengelolaan Aset Negara. Adapun target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah :

- i) Tanah Bangunan Gedung Kantor (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya)
- ii) Tanah Bangunan Rumah Negara (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya)
- iii) Bangunan Gedung Kantor
- iv) Bangunan Rumah Negara

Adapun target yang diberikan adalah 62% dan di tahun 2021 telah tercapai realisasi sebesar 71,85% dari target tersebut.

TABEL 7

SBSK	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	2021
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
Realisasi	-	69,53%	69,53%	70,27%	70,27%	71,44%	71,44%
Capaian	-	139,07%	139,07%	127,76%	127,76%	115,22%	115,22%

b. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)

Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang tertuang dalam IKU pada tahun 2021, KPKNL Padang ditargetkan memperoleh persentase 100%, pada akhir tahun anggaran KPKNL Padang memperoleh 109,46% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini diperoleh dari kerjasama antar pejabat dan pegawai KPKNL Padang dan *stakeholder* yang berada di wilayah kerja KPKNL Padang. Perbandingan manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara antara target dan realisasi kinerja untuk KPKNL Padang antara lain sebagai berikut:

TABEL 8

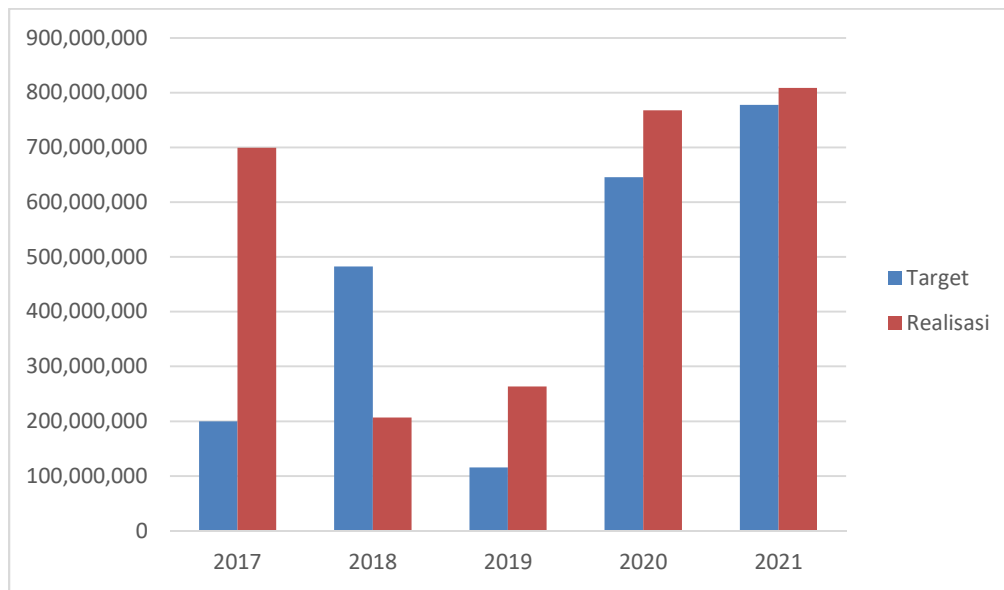
No	Keterangan	Target	Realisasi
1.	PNBP Pengelolaan BMN	Rp10.300.000.000	Rp12.357.792.357
2.	PNBP Piutang Negara	Rp7.193.189	Rp15.542.905
3.	PNBP Lelang	Rp3.067.000.000	Rp2.265.536.481
	Total	Rp13.374.193.189	Rp14.638.871.743

c. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)

Realisasi Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) pada tahun 2021 dengan kriteria berkas sampai dengan 31 Des 2017. Target yang diberikan berjumlah Rp777.933.929 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp808.567.922. Capaian realisasi tersebut dapat memenuhi target karena kemampuan dan itikad debitur untuk menyelesaikan hutangnya serta upaya proaktif dari pegawai KPKNL Padang. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 9

PNDS	2017	2018	2019	2020	2021
Target	200.000.000	482.500.000	115.344.249	645.757.869	777.933.929
Realisasi	699.440.429	206.746.498	263.709.103	767.579.741	808.567.922

GRAFIK 4

Perbandingan Realisasi Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan semua BKPN BUMN/D Perbankan telah dikembalikan ke masing-masing penyerah piutang sesuai PMK 168/PMK.06/2013. Pada tahun 2021, kendala pencapaian Target:

1. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan susahnya perekonomian masyarakat sehingga debitur yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutang.
2. Adanya beberapa debitur telah melunasi hak penyerah piutang sementara biad belum dibayar.
3. Adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dimana Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER/16/012015/Nomor PRJ-01/KN/2015 tanggal 29 Januari 2015 sudah berakhir dan tidak ada perpanjangan. Imbasnya KPKNL/PUPN Cabang tidak dapat menerima penyerahan pengurusan piutang dari BPJS dan KPKNL/PUPN Cabang mengembalikan BKPN kepada BPJS selaku Penyerah Piutang. Hal ini menyebabkan berkurangnya PNDS pada KPKNL Padang.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Indeks Ketepatan waktu Layanan kekayaan negara dan Lelang

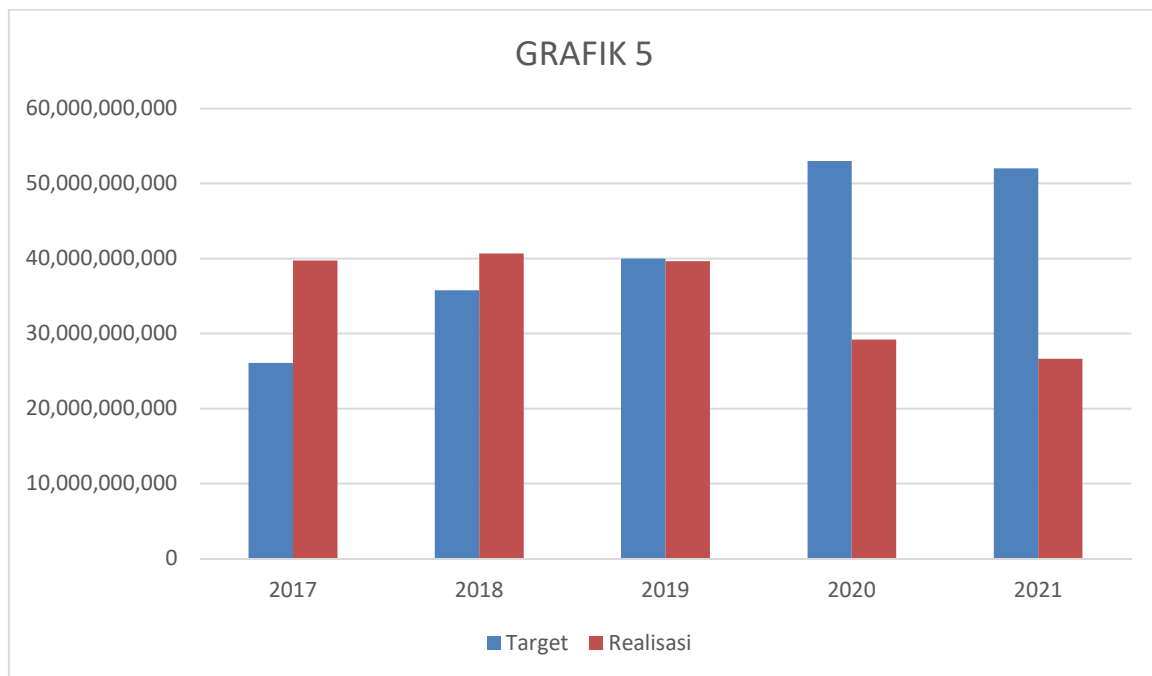
Realisasi Persentase pemenuhan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara pada tahun 2021 ialah sebesar 92,85 dari target sebesar 92.

b. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Realisasi pokok lelang dari kelas I pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp26.640.097.586 dari target yang ditetapkan sebesar Rp52.000.000.000. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 10

Pokok Lelang	2017	2018	2019	2020	2021
Target	26.100.000.000	35.752.000.000	40.000.000.000	53.000.000.000	52.000.000.000
Realisasi	39.731.768.720	40.675.581.100	39.666.016.596	29.194.836.581	26.640.097.586



Realisasi Pokok Lelang pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup jauh, hal ini merupakan salah satu dampak dari bencana non alam yakni pandemi Covid-19 dimana kondisi perekonomian terganggu yang mengakibatkan daya beli masyarakat juga menurun. Selain itu, isu terkait bencana alam gempa bumi *megathrust* yang melanda Kota Padang dan sekitarnya juga ikut mempengaruhi penurunan capaian lelang.

KPKNL Padang tetap terus berupaya dan kerja keras untuk terus meningkatkan capaian di tahun mendatang. KPKNL Padang terus berkoordinasi dengan pemohon lelang baik dari pihak perbankan maupun Instansi Pemerintah dan PT.Pegadaian untuk menggali potensi lelang.

Sasaran Strategis 3: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Dengan Indikator Kinerja Utama:

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

Realisasi indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan pada tahun 2021 sebesar 4,85 (skala 5). Indeks kepuasan layanan pengguna layanan diukur untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan yang diberikan KPKNL Padang di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Indeks kepuasan diukur melalui survei yang dilakukan oleh internal KPKNL Padang.

Layanan	Total Indeks
Pengelolaan Kekayaan Negara	4,85
Piutang Negara	4,83
Pelayanan Penilaian	4,84
Pelayanan Lelang	4,86
Indeks Kepuasan	4,85

Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi

Identifikasi merupakan proses pemetaan BMN berupa bidang tanah pada Kementerian/Lembaga melalui Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Pemetaan tanah dilakukan berdasarkan lokasi, luas tanah, batas-batas, nilai BMN dan nama pemilik tanah. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang dibukukan dalam buku tanah tersebut. Persentase BMN berupa bidang tanah pada K/L yang diidentifikasi

sudah dan didata pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1.042 bidang tanah. Hingga akhir tahun 2021 telah tercapai sebanyak 1.060 bidang tanah yang tersertifikasi.

b. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Mulai Tahun 2020, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang melakukan upaya peningkatan mutu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui evaluasi kinerja Portofolio Aset. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan salah satu misi DJKN yaitu mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara. KPKNL Padang telah menyelesaikan sebanyak 71 portofolio dari 68 target di tahun 2021.

c. Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian

Terkait deviasi ketergunaan hasil penilaian, nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian dapat digunakan sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN. Persentase realisasi yang dicapai mencapai 120% dari target yang diberikan.

Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

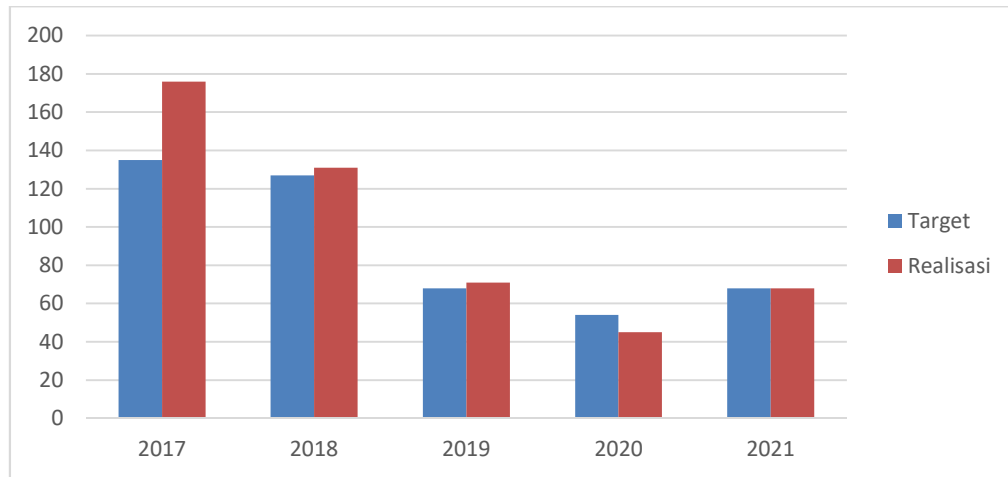
a. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

Penatausahaan Berkas Kasus Piutang negara (BKPN) memiliki peran yang sangat penting dalam pengurusan piutang negara dimana saat ini menjadi salah satu tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan (lunas, ditarik, PSBDT, dikembalikan) pada tahun 2021 tercapai sebesar 68 berkas. Capaian ini sejalan dengan jumlah piutang Negara yang dapat diselesaikan. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain :

TABEL 11

BKPN	2017	2018	2019	2020	2021
Target	135	127	68	54	68
Realisasi	176	131	71	45	68

GRAFIK 6



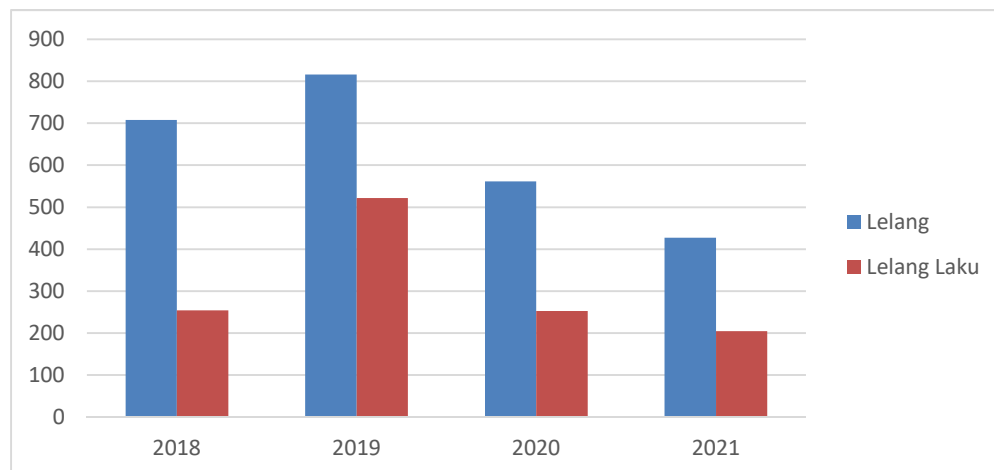
b. Presentase produktifitas lelang

Realisasi jumlah frekuensi lelang pada tahun 2021 sebanyak 427 frekuensi dengan lelang yang laku sebanyak 205 frekuensi. Realisasi presentase produktifitas lelang mencapai 48,1% dari target yang ditetapkan sebesar 35%.

TABEL 12

Frekuensi	2018	2019	2020	2021
Lelang	708	816	561	427
Lelang yang laku	254	522	253	205

GRAFIK 7



c. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

Pada tahun 2015, mulai diperkenalkan pelaksanaan lelang melalui internet dengan aplikasi e-auction. Pada tahun 2021 ini, Indikator Kinerja Utama ini tercapai sebesar 100%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 13

<i>e-Auction</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target	20%	25%	60,00%	85%	90%	90%	92%
Realisasi	38,29%	52,60%	62,73%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 6: Edukasi yang efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

Berdasarkan Kontrak Kinerja KPKNL Padang dengan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, target IKU “Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi” tahun 2021 ditetapkan sebesar 92,00. Dari hasil evaluasi kinerja, target tersebut telah terealisasi sebesar 98,50 dari target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 14

Edukom	2017	2018	2019	2020	2021
Target	85	87	87	90	92
Realisasi	92,19	92,35	93,495	92,50	98,50

Sasaran Strategis 7: Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama: Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Realisasi Persentase tindak lanjut pengelolaan Aset di KPKNL Padang pada tahun 2021 adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

TABEL 15

Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	2021
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L	29
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L	40
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020	32
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021	45

Sasaran Strategis 8: SDM yang Kompeten

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

KPKNL Padang berhasil mencapai sebesar 100% dari target sebesar 100%. Persentase pengembangan kompetensi pegawai menggambarkan kesesuaian kompetensi pegawai dengan bidang pekerjaannya. Lingkup peningkatan kompetensi pegawai salah satunya adalah melalui pelatihan yang diselenggarakan di BPPK maupun di luar BPPK, meliputi seminar, sosialisasi, *internship/on the job training*, *basic training* (DTSD), *workshop*, bimbingan teknis dan *sharing session*. Bimbingan teknis dan *sharing session* harus melibatkan narasumber eksternal satker penyelenggara. Perbandingan antara target dan realisasi pemenuhan standar *hard competency* beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 16

<i>Hard Competency</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Target	90	91	87	100	100
Realisasi	93,10	100	100	100	100

Sasaran Strategis 9: Organisasi yang *fit-for-purposes*

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM

Setelah tahun 2018 meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menpan-RB, di tahun 2021 KPKNL Padang berkesempatan untuk mengikuti kompetensi Unit Kerja terhadap kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), namun dalam tahapan seleksi KPKNL Padang belum dapat memenuhi syarat ambang batas sebagai unit kerja berpredikat WBBM. Dari target 85, KPKNL Padang hanya meraih 98,3.

b. Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja

Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja tugas KPKNL telah dilaksanakan dengan realisasi pada tahun 2021 adalah 96,25 dari target sebesar 75 dengan peningkatan sebesar 128,33%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 17

Survei	2017	2018	2019	2020	2021
Target	100	70	75	75	75
Realisasi	100	90,41	92,40	85	96,25

c. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Forum Group Discussion (FGD) merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Kegiatan FGD ini menjadi suatu kegiatan rutin yang diadakan oleh Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Padang. Keefektifitasan penyelenggaraan FGD tersebut mendapatkan indeks 98,65 dari target 80.

Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Dengan Indikator Kinerja Utama:

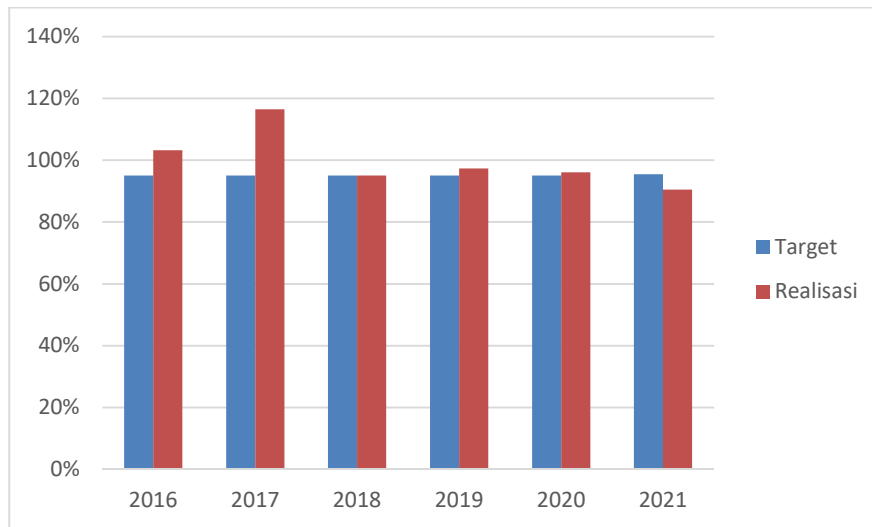
a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk tahun 2021 sebesar 94,54% dari target yang ditetapkan yaitu 95,5%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 18

Anggaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95,5%
Realisasi	103,21%	116,49%	95%	97,29%	96,06%	94,54%

GRAFIK 8



KINERJA LAINNYA

Selain dari 20 (dua puluh) IKU yang ditetapkan oleh DJKN dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPKNL Padang juga telah melakukan kegiatan/partisipasi yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain

Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013, antara lain terhadap barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/atau Negara asing serta barang yang diperoleh dari pembubaran badan yang dibentuk Kementerian/ Lembaga.

2. Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Asset Manager DJKN 21/22

Dalam rangka meningkatkan peran pengelola BMN dalam memberikan manfaat dan dampak ekonomi social terhadap masyarakat sekitar, KPKNL Padang pada tahun 2021 telah mengikuti Kompetisi Inovasi (KOIN) Asset Manager DJKN 21/22.

3. Pelaksanaan Penyitaan Asset PT. Texmaco Group di wilayah Kota Padang

Pada akhir tahun 2021 KPKNL Padang menerima permohonan bantuan penyitaan dari KPKNL Jakarta III terhadap asset PT Texmaco Group berupa Sebidang tanah SHGB No. 8 seluas 125.360 m2 berlokasi di Jalan Lintas Padang-Solok, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaksanaan penyitaan dilakukan secara serentak bersamaan dengan penyitaan terhadap 587 bidang asset PT Texmaco Group yang berada di 5 kota yaitu Kota Batu malang, Kota Pekalongan, Subang, Sukabumi dan Kota Padang. Kegiatan penyitaan ini dibackup secara oleh unsur-unsur keamanan seperti Polres, Polsek, Kodim, Koramil aparat kelurahan/aparat kecamatan setempat dan juga dihadiri oleh anggota satgas BLBI dari unsur Bareskrim

4. Pelaksanaan Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (Kedai Lelang UMKM) tahun 2021

KPKNL Padang pada tahun 2021 telah mengikuti Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM melalui program Kedai Lelang UMKM Tahun 2021. Pelaksanaan Lelang UMKM dimaksud dilaksanakan sebanyak 6 frekuensi dengan total 61 lelang. Beberapa Produk UMKM di Sumatera Barat telah dijual melalui lelang dengan perantara KPKNL padang. Produk-produk UMKM yang telah dilelang antara lain, berbagai jenis rendang, jilbab, kerajinan tangan, lukisan, sandal dan sepatu, rajutan, kain sarung dan lain-lain dengan nilai total laku terjual sebesar Rp4.463.000..

5. Pelaksanaan *Press Release* Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2021, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumbar termasuk KPKNL Padang yang mewakili unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Provinsi Sumatera Barat mengikuti kegiatan Pers Release Capaian Kinerja terkait dengan pengelolaan APBN di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan setiap triwulan bersama dengan Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja selama di tahun 2021 dianalisis dalam rapat dialog kinerja organisasi KPKNL Padang periode triwulan IV tahun 2021. Dalam rapat DKO tersebut, disampaikan reuiu capaian kinerja dengan nilai kinerja organisasi KPKNL Padang pada tahun 2021 adalah 110,24. Namun terdapat 1 (satu)

buah IKU yang capaiannya kuning yaitu Persentase Kualitas Pengelolaan Anggaran. Hal ini disebabkan Terdapat Keterlambatan Data Kontrak Triwulan III yang disebabkan oleh lamanya respon pegawai KPPN terhadap kontrak yang diajukan dan sulitnya menyesuaikan realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana.

RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO UNTUK TAHUN 2022

Memasuki tahun 2022 ini, KPKNL Padang bersiap membenahi organisasi dan menjalankan rencana aksi yang telah ditetapkan demi meningkatkan kinerja organisasi KPKNL Padang. Berikut mitigasi risiko dan rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Padang pada tahun 2022:

1. IKU Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara Yang bersumber dari PNBP lelang, PNBP Piutang, dan PNBP Aset. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022, antara lain:
 - Sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja
 - Melakukan penggalan potensi PNBP pada satuan kerja
2. IKU Sertifikasi BMN, rencana aksi:
 - Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Kanwil Pertanahan beserta satker terkait.
 - Menginventarisir kembali bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat.
3. IKU Persentase Hasil Lelang, rencana aksi :
 - Penggalan potensi lelang dan membuat daftar potensi lalu tahun 2022
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemohon lelang terutama lelang eksekusi hak tanggungan Perbankan
 - Sosialisasi dengan masyarakat terkait lelang
 - Koordinasi dengan para pelaku usaha UMKM melalui dinas terkait
4. IKU Tata kelola piutang negara dan lelang yang akuntabel, rencana aksi :
 - Menginventarisasikan BKPN yang pengurusannya belum optimal
 - Membentuk Tim penyelesaian Piutang Negara dengan Penyerah Piutang
 - Melakukan verifikasi kembali terhadap objek Crash Program Tahun 2022
 - Melakukan pengurusan secara optimal terhadap BKPN yang belum terselesaikan di tahun 2021.

REALISASI ANGGARAN**Pengukuran Capaian Output Belanja dan Penyerapan Anggaran KPKNL Padang**

Pada tahun 2021, KPKNL Padang mendapatkan alokasi anggaran belanja setelah revisi sebesar Rp1.705.843.000. Dan hingga akhir 2021, jumlah realisasi anggaran sebesar Rp1.686.813.498 atau total anggaran yang tersedia telah diserap sebesar 98,8%.

**DATA PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT
KPKNL PADANG
PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	RINCIAN OUTPUT	Pagu Akhir	Realisasi Anggaran
4796.BMB.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	2,710,000	2,710,000
4796.BMB.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	100,000	-
4797.FAE.001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Manajemen Risiko, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Bidang Kekayaan Negara dan Lelang	80,000	-
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	28,224,000	25,081,000
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	25,848,000	23,835,000
4798.AAH.003	Risalah Lelang	22,361,000	22,061,000
4798.FAE.001	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	14,892,000	14,414,480
4798.FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	43,848,000	43,198,000
4798.FAE.005	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	110,000	-
4798.FAE.006	Rekomendasi Hasil Penilaian	14,043,000	6,210,000
4798.FAK.001	Pengelolaan Aset BUN	41,116,000	39,060,000
4700.EAG.001	Advokasi Hukum	9,948,000	9,830,000
4701.EAC.001	Operasionalisasi Kantor	1,002,263,000	998,974,329
4701.EAC.002	Kerumahtangaan	38,688,000	38,544,622
4701.EAD.001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164,070,000	163,975,483
4701.EAE.001	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293,152,000	293,094,484
4702.BMB.003	Publikasi	428,000	400,000
4704.EAK.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	3,962,000	3,802,500

**DATA CAPAIAN RINCIAN OUTPUT
KPKNL PADANG
PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	KRO / RO	Target	Satuan	Capaian	CRO	(CRO x Pagu) - Realisasi
4796.BMB.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	2	Kegiatan	3	1.50	542,000
4796.BMB.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	3	Kegiatan	5	1.67	120,000
4797.FAE.001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Manajemen Risiko, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Bidang Kekayaan Negara dan Lelang	1	Rekomendasi	1	1.00	80,000
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	114	Surat Persetujuan/Penolakan	316	2.77	8,787,800
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	50	BKPN	68	1.36	7,182,600
4798.AAH.003	Risalah Lelang	276	Risalah Lelang	427	1.55	4,772,200
4798.FAE.001	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	1042	Rekomendasi	1060	1.02	734,771
4798.FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	183	Rekomendasi	361	1.97	9,419,600
4798.FAE.005	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	Rekomendasi	1	1.00	110,000
4798.FAE.006	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	Rekomendasi	1	1.00	7,833,000
4798.FAK.001	Pengelolaan Aset BUN	23	Aset	1280	55.65	10,279,200
4700.EAG.001	Advokasi Hukum	8	Perkara	34	4.25	2,107,600
4701.EAC.001	Operasionalisasi Kantor	12	Bulan Layanan	12	1.00	3,288,671
4701.EAC.002	Kerumahtangaan	12	Bulan Layanan	12	1.00	143,378
4701.EAD.001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145	Unit	145	1.00	94,517
4701.EAE.001	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2534	m2	2534	1.00	57,516
4702.BMB.003	Publikasi	6	Kegiatan	3967	661.17	113,600
4704.EAK.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	Laporan	5	1.00	159,500
CRO					234.44%	55,825,953
Efisiensi						3.27%

**PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO
KPKNL PADANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

Uraian		Pagu Akhir (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan IV (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	
Pagu Bruto		1,705,843,000	1,686,813,494	98.88%
Faktor Pengurang				
a.	Belanja Pegawai	-	-	
b.	Self Blocking			
c.	Hasil Efisiensi		19,029,506	
d.	Dana Khusus	-	-	
Penyerapan Anggaran Neto		1,686,813,494	1,667,783,988	98.87%
Trajectory Penyerapan Anggaran Neto Triwulan IV				95%
Capaian Indikator Penyerapan Anggaran Neto Triwulan IV				104%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2021 merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan kinerja KPKNL Padang dalam Tahun Anggaran 2021 yang disusun untuk memenuhi asas *good governance* serta mewujudkan suatu penyelenggaraan negara yang bebas KKN dimana setiap penyelenggara layanan publik wajib menyusun suatu laporan kinerja.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang (KPKNL) Padang merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang meliputi barang milik negara, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, supervise atas pelaksanaan lelang dan lain sebagainya. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2012 yang menyatakan bahwa PUPN tidak berwenang lagi menagih piutang BUMN karena pengelolaan harta dan kekayaan BUMN harus didasarkan pada praktik korporasi yang sehat sesuai UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam luas lingkup tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan KPKNL Padang yang berkaitan dengan penagihan piutang yang berasal dari Bank BUMN. Demikian juga dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur kembali kebijakan di bidang Piutang Negara terutama piutang yang tidak terkonsolidasi dalam laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam hal ini piutang penyerahan dari BPJS. Dengan terbitnya SE ini maka KPKNL/PUPN Cabang tidak dapat menerima penyerahan pengurusan piutang dari BPJS dan KPKNL/PUPN Cabang mengembalikan BKPN kepada BPJS selaku Penyerah Piutang.

Bermodalkan prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2018, KPKNL Padang terus meningkatkan dan mengembangkan diri menjadi unit pelayanan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di tahun 2021. Meskipun gagal meraih predikat ZI WBBM di tahun 2021 KPKNL Padang tetap berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder. Berbagai permasalahan yang dihadapi menjadi pembelajaran yang berharga bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya KPKNL Padang. Capaian kinerja yang telah diraih pada akhir tahun 2021, hambatan

eksternal maupun internal diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas pegawai KPKNL Padang sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Kami berharap penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2021 ini dapat memberikan penjelasan secara mendalam kepada *stakeholder* terkait tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kami menyambut baik setiap *feedback* dari semua pihak sehingga dapat secara proaktif ikut membangun pelayanan publik yang menerapkan asas *good governance* dan bebas KKN.

LAMPIRAN



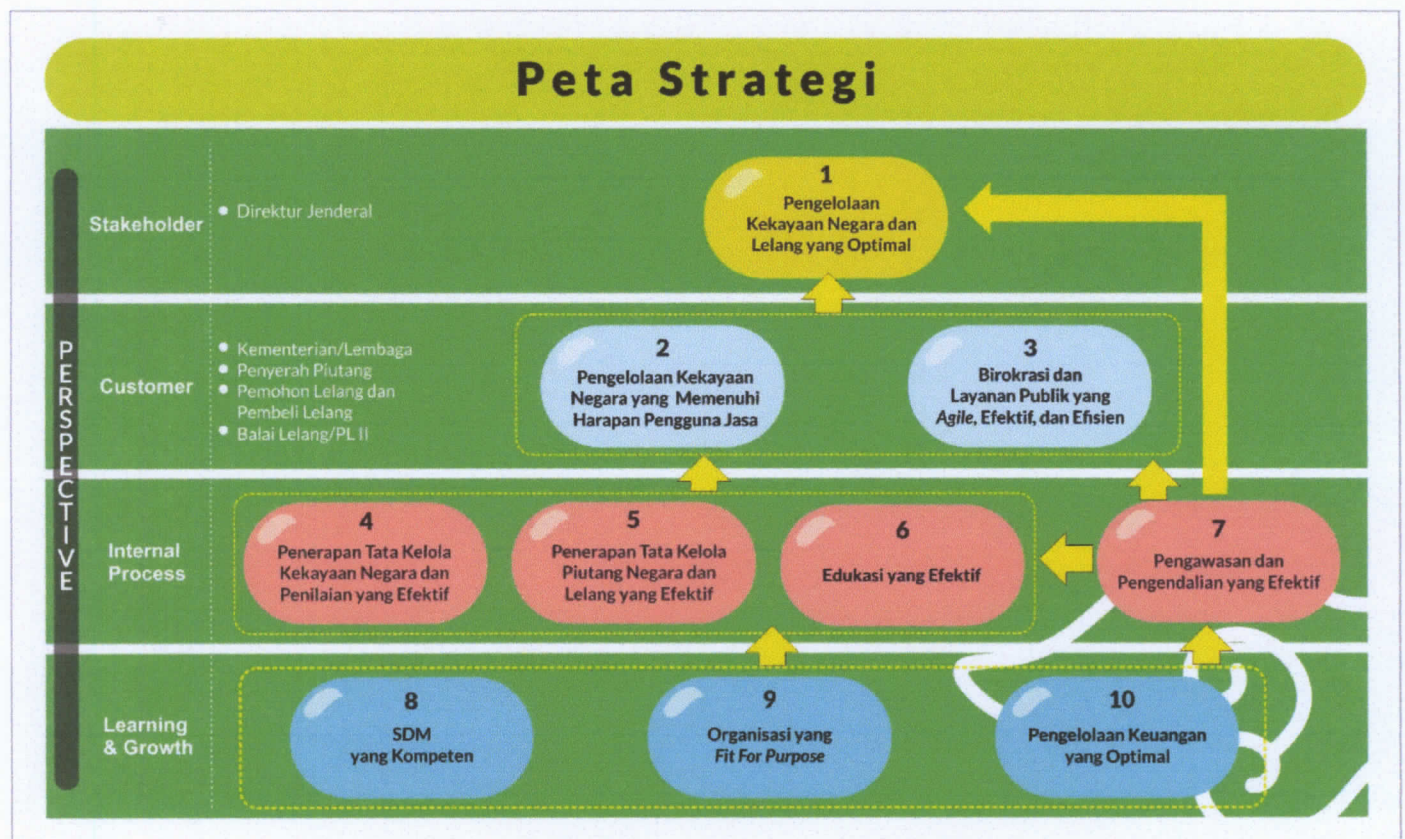
**KONTRAK KINERJA
NOMOR 8/KN.15/2021**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	92
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,45
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	80 WBBM
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

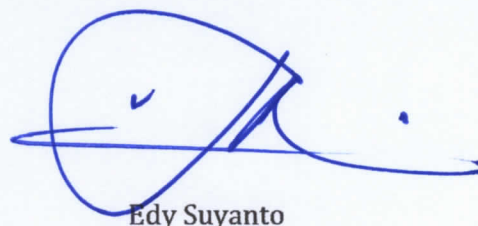
Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	324,108,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	14,762,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	36,030,000
3. Pengelolaan Aset	273,316,000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	
Dukungan Manajemen	
1. Legislasi dan Litigasi	8,405,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,705,163,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1,971,000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	3,962,000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	

Padang, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang

Sudarsono



Edy Suyanto

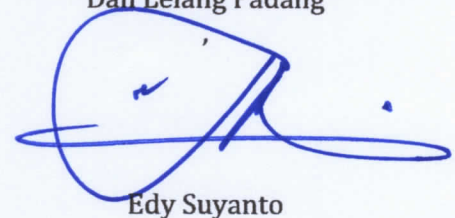
RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	92	92	92	92	92	92	92
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,45	4,45
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	92	92	-	92	92	92
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	80 WBBM	80 WBBM
9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Padang, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Padang



Edy Suyanto

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Sudarsono	1	Nama	Edy Suyanto
2	NIP	19691214 199603 1 002	2	NIP	196507121993031001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda/IV.c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tingkat I/IV.b
4	Jabatan	Kepala Kanwil DJKN	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	5	Unit Kerja	KPKNL Padang

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudkan Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	92	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4.45	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	92	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
17	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	80 WBBM	100	12 bulan	-
19	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
20	Melaksanakan FGD Pejabat Administrator	-	80	100	12 bulan	-
21	Meningkatkan Kual	-	95,5%	100	12 bulan	(Rp2,0 43 M

Padang, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,

Sudarsono

PNS yang Dinilai,

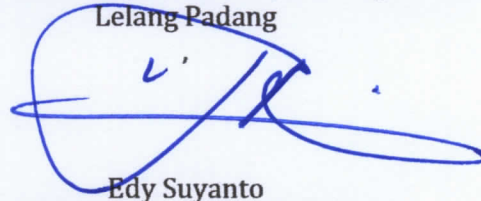
Edy Suyanto

NIP 19650712 199303 1 001

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN (KGIN)	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan		

Padang, Januari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Padang



Edy Suyanto
NIP 19650712 199303 1 001